

**ETNIS TIONGHOA PADA PERISTIWA KERUSUHAN MEI 1998
DI JAKARTA**

(Skripsi)

**Oleh:
SARAH OKTAVIANY BR GINTING**



**FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2019**

ABSTRAK

ETNIS TIONGHOA PADA PERISTIWA KERUSUHAN MEI 1998 DI JAKARTA

**OLEH
SARAH OKTAVIANY BR GINTING**

Kerusuhan Mei 1998 di Jakarta terjadi pada tanggal 13-15 Mei 1998 yang menjadi sejarah kelam bagi Bangsa Indonesia, khususnya bagi orang-orang keturunan Tionghoa. Kesulitan ekonomi akibat krisis yang terjadi menyebabkan masyarakat Indonesia mengalami kesulitan memenuhi kebutuhan mereka. Akibat ketidakpuasan atas pemerintah yang tidak mampu menyelesaikan krisis memunculkan aksi demonstrasi oleh masyarakat Indonesia khususnya dari kalangan mahasiswa. Tewasnya empat mahasiswa Trisakti membuat keadaan semakin tidak terkendali dengan terjadinya kerusuhan di beberapa tempat di Jakarta. Etnis Tionghoa menjadi salah satu korban atas tidak kerusuhan tersebut dimana toko, rumah, maupun yang diidentifikasi sebagai milik orang Tionghoa dirusak dan dijarah.

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah “Apa sajakah yang melatarbelakangi etnis Tionghoa menjadi korban pada Kerusuhan Mei 1998 di Jakarta?”. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui latar belakang etnis Tionghoa menjadi korban pada Kerusuhan Mei 1998 di Jakarta. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian sejarah (*historis*). Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah teknik kepustakaan dan teknik dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan adalah teknik analisis data kualitatif.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, penulis mengambil kesimpulan bahwa latar belakang etnis Tionghoa menjadi korban pada Peristiwa Kerusuhan Mei 1998 di Jakarta adalah Pengusaha Tionghoa mendominasi perekonomian, relasi antara Pengusaha Tionghoa dengan Penguasa Orde Baru, status kewarganegaraan dan sentimen anti-Tionghoa, implementasi kebijakan asimilasi terhadap etnis Tionghoa, praktik korupsi Pengusaha Tionghoa saat krisis ekonomi, serta pemukiman yang terpisah. Berdasarkan peristiwa tersebut dapat dijadikan pengalaman berharga dan pembelajaran bagi bangsa Indonesia agar kejadian seperti itu tidak terjadi lagi demi kesatuan dan keutuhan bangsa Indonesia tercinta.

Kata kunci : Jakarta, Kerusuhan, Tionghoa

**ETNIS TIONGHOA PADA PERISTIWA KERUSUHAN MEI 1998
DI JAKARTA**

Oleh

SARAH OKTAVIANY BR GINTING

(Skripsi)

Sebagai Salah Satu Syarat untuk Mencapai Gelar
SARJANA PENDIDIKAN

Pada

**Program Studi Pendidikan Sejarah
Jurusan Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial**



**FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2019**

Judul Skripsi : **ETNIS TIONGHOA PADA PERISTIWA KERUSUHAN
MEI 1998 DI JAKARTA**

Nama Mahasiswa : **Sarah Oktaviany Br Ginting**

Nomor Pokok Mahasiswa : 1513033020

Program Studi : Pendidikan Sejarah

Fakultas : Keguruan dan Ilmu Pendidikan

MENYETUJUI

Komisi Pembimbing

Pembimbing I,

Drs. Syaiful M., M.Si
NIP. 196107031985031004

Pembimbing II,

Yustina Sri Ekwandari, S.Pd., M.Hum
NIP. 197009132008122002

MENGETAHUI

Ketua Jurusan Pendidikan
Ilmu Pengetahuan Sosial

Drs. Tedi Rusman, M.Si
NIP. 196008261986031001

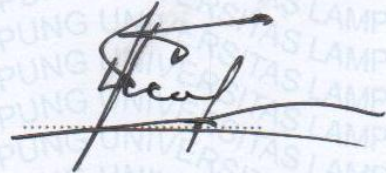
Ketua Program Studi
Pendidikan Sejarah

Drs. Syaiful M., M.Si
NIP. 196107031985031004

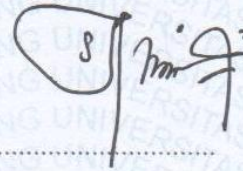
MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

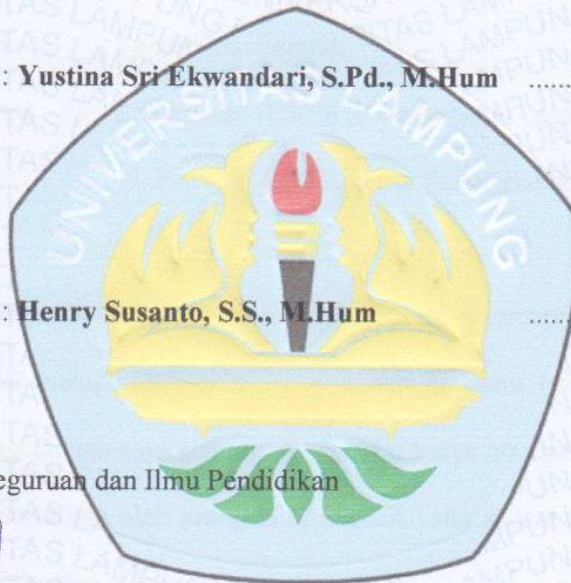
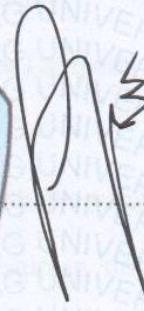
Ketua : **Drs. Syaiful M, M.Si**



Sekretaris : **Yustina Sri Ekwandari, S.Pd., M.Hum**



Penguji
Bukan Pembimbing : **Henry Susanto, S.S., M.Hum**



2. Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan



Prof. Dr. Patuan Raja, M.Pd.
NIP. 19620804 198905 1 001

Tanggal Lulus Ujian Skripsi : 06 September 2019

RIWAYAT HIMPUN

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini adalah :

Nama : Sarah Oktavianny Br Ginting

NPM : 1513033020

Program Studi : Pendidikan Sejarah

Jurusan/Fakultas : Pendidikan IPS/FKIP Universitas Lampung

Alamat : Jl. Pisces No. 7 Rajabasa Indah, Bandar Lampung

Dengan ini menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebut dalam daftar pustaka.

Bandar Lampung, 01 September 2019



Sarah Oktavianny Br ginting
NPM. 1513033020

RIWAYAT HIDUP



Penulis dilahirkan di Medan, pada tanggal 12 Oktober 1997, anak keempat dari pasangan Bapak Permanen Ginting dan Ibu Pengalamen Br Pinem. Penulis memulai pendidikan di Sekolah Dasar (SD) Negeri 040559 Biaknampe Kec. Juhar diselesaikan pada tahun 2009, Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 2 Kabanjahe diselesaikan pada tahun 2012, kemudian melanjutkan ke Sekolah Menengah Atas (SMA) Katolik 1 Kabanjahe diselesaikan pada tahun 2015 berijazah. Pada tahun 2015, peneliti diterima sebagai mahasiswa Universitas Lampung Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Jurusan Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial pada Program Studi Pendidikan Sejarah dengan jalur SNMPTN dan menerima beasiswa BIDIKMISI.

Pada Semester VI penulis melaksanakan Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Desa Padang Ratu, Kecamatan Wonosobo, Kabupaten Tanggamus, dan menjalani Program Pengalaman Lapangan (PPL) di SMA Negeri 1 Wonosobo, Kabupaten Tanggamus. Selama menjadi mahasiswa, penulis pernah aktif dalam Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) tingkat Universitas maupun tingkat Program Studi. Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) yang diikuti, antara lain Unit Kegiatan Mahasiswa Kristen (UKMK) sebagai anggota, Forum Komunikasi Mahasiswa Pendidikan Sejarah (FOKMA) sebagai anggota.

MOTTO

“Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku”

(Filipi 4:13)

“Kekuatan tidak berasal dari kemenanganmu, perjuanganmulah yang mengembangkan kekuatanmu. Ketika kamu melewati waktu-waktu sulit dan memilih untuk tidak menyerah, itulah arti kekuatan”

(Mahatma Gandhi)

PERSEMBAHAN

Puji dan syukur kepada Tuhan Yesus Kristus atas segala berkat dan karunia-Nya.

Penulis persembahkan sebuah karya kecil ini teruntuk : Kedua orang tuaku Bapak Permanen Ginting dan Ibu Pengalamen Br Pinem yang telah membesarkanku dengan penuh kasih sayang dan kesabaran, selalu memberi motivasi, nasihat, dan membimbingku tanpa lelah dan tanpa henti, serta senantiasa selalu mendoakanku yang terbaik. Semua yang telah diberikan oleh Bapak dan ibu yang sampai kapan pun tidak dapat terbalaskan olehku. Teruntuk saudara dan saudariku tersayang Jimmi Ginting, Rikki Ginting, dan Oliviana Br Ginting terima kasih karena selalu memberi semangat dan motivasi kepadaku.

Bapak dan Ibu dosen program studi Pendidikan Sejarah, terima kasih atas bimbingan, motivasi, dan pengalaman yang telah diberikan selama ini baik didalam lingkungan kampus ataupun diluar lingkungan kampus. Serta sahabat dan teman-teman Pendidikan Sejarah Angkatan 2015 yang telah memberikan semangat dan dukungan kepadaku, terima kasih atas kebersamaan dan keceriaan yang selalu diberikan.

*Untuk Almamater tercinta
"Universitas Lampung".*

SANWACANA

Puji syukur penulis ucapkan atas kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas berkat dan karuniaNya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

Penulisan skripsi yang berjudul **“Etnis Tionghoa Pada Peristiwa Kerusuhan Mei 1998 di Jakarta”** sebagai salah satu syarat untuk meraih gelar Sarjana Pendidikan pada Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung. Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan, motivasi, bimbingan, dukungan, dan saran dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terima kasih yang setulusnya kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Patuan Raja, M.Pd. Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Lampung;
2. Bapak Dr. Sunyono, M.Si. Wakil Dekan I Bidang Akademik dan Kerja Sama Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Lampung;
3. Bapak Drs. Supriyadi, M.Pd. Wakil Dekan II Bidang Umum dan Keuangan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Lampung;
4. Ibu Dr. Riswanti Rini, M.Si. Wakil Dekan III Bidang Kemahasiswaan dan Alumni Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Lampung;
5. Bapak Drs. Tedi Rusman, M.Si. Ketua Jurusan Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Lampung;

6. Bapak Drs. Syaiful M, M.Si. Ketua Program Studi Pendidikan Sejarah, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Lampung sekaligus Dosen Pembimbing I penulis, terima kasih atas segala saran serta masukan, dan motivasi dalam penyusunan skripsi ini.
7. Ibu Yustina Sri Ekwandari, S.Pd., M.Hum. Dosen PA sekaligus Pembimbing II penulis, terima kasih atas segala saran, motivasi serta kesabaran dalam membimbing penulis dalam melakukan penulisan skripsi ini.
8. Bapak Henry Susanto, S.S., M.Hum. Dosen Pembahas Utama penulis,terimakasih atas masukan, kritik, motivasi, dan saran yang membangun dalam penulisan skripsi ini;
9. Seluruh Dosen Program Studi Pendidikan Sejarah, Jurusan Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung, yaitu Bapak Drs. Maskun, M.H., Bapak Drs. Ali Imron.,M.Hum., Ibu Dr. Risma Margaretha Sinaga,M.Hum., Bapak Muhammad Basri, S.Pd., M.Pd., Bapak Suparman Arif, S.Pd.,M.Pd., Ibu Myristica Imanita, S.Pd.,M.Pd., Bapak Cheri Saputra, S.Pd.,M.Pd., Bapak Marzius Insani, S.Pd., M.Pd., Ibu Valensy Rachmedita, S.Pd., M.Pd., Bapak Sumargono, S.Pd.,M.Pd. Terima kasih atas ilmu, bantuan dalam bentuk apapun, dukungan, motivasi dan pengalaman yang diberikan selama proses belajar mengajar maupun di luar kampus.
10. Bapak dan Ibu staf Tata Usaha dan Karyawan Universitas Lampung.
11. Bapak dan Ibu staf di Arsip Nasional Republik Indonesia yang telah mengizinkan dan memberikan pelayanan yang terbaik bagi penulis dalam melakukan penelitian.

12. Bapak dan Ibu staf di Perpustakaan Nasional Republik Indonesia yang telah mengizinkan dan memberikan pelayanan yang terbaik bagi penulis dalam melakukan penelitian.
13. Sahabat tercinta yang telah membantu dalam perkuliahan ini dalam suka maupun duka dan selalu memberikan keceriaan, yaitu : Suciana, Kemalawati, Gabriella Revika.
14. Sahabat-sahabat dan tim yang luar biasa dalam melakukan penelitian ke Jakarta: Dilla Sari, Diskalia Amandah, Pranita Dewi Vanli, dan Luktiani.
15. Terimakasih kepada Tomi Rizki Putra, Epi Yanti, Angela Della D C, Zahra Qurrotuaini, Royadi Irwansyah, Rizaludin, Rozi Fadila Putra, Windiya Prihandini, Ade Nursevita, Lulu Muthoharoh, Andre Mustofa Meihan, dan Novi Arisanti yang telah memberikan dukungan dan semangat kepada penulis.
16. Keluarga besar Pendidikan Sejarah, terima kasih atas kekeluargaan ini hingga menjadi memori indah yang akan selalu dikenang oleh penulis.

Semoga hasil penulisan ini dapat berguna dan bermanfaat bagi kita semua. Penulis mengucapkan terima kasih atas segala bantuannya, semoga Tuhan Yang Maha Esa, memberikan kebahagiaan atas semua yang telah kalian semua berikan

Bandar Lampung, 01 September 2019

Penulis,

Sarah Oktaviany Br Ginting
NPM. 1513033020

DAFTAR ISI

Halaman

DAFTAR ISI DAFTAR TABEL DAFTAR LAMPIRAN

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah	1
1.2. Rumusan Masalah	9
1.3. Tujuan Penelitian.....	9
1.4. Kegunaan Penelitian.....	9
1.4.1. Bagi Universitas Lampung.....	9
1.4.2. Bagi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan.....	9
1.4.3. Bagi Penulis.....	10
1.4.4. Bagi Pembaca.....	10
1.5. Ruang Lingkup Penelitian	10
1.5.1. Objek Penelitian	10
1.5.2. Subjek Penelitian.....	10
1.5.3 Tempat Penelitian	10
1.5.4. Waktu Penelitian	10
1.5.5. Konsentrasi Ilmu	10

REFERENSI

II. TINJAUAN PUSTAKA, KERANGKA PIKIR, DAN PARADIGMA

2.1. Tinjauan Pustaka	12
2.1.1. Konsep Etnis.....	12
2.1.1.1. Konsep Etnis Tionghoa.....	14
2.1.2. Konsep Peristiwa Kerusuhan Mei 1998 di Jakarta	17
2.1.3. Konsep Pribumi-NonPribumi	19
2.2. Kerangka Pikir.....	20
2.3. Paradigma.....	23

REFERENSI

III. METODE PENELITIAN

3.1. Metode Penelitian.....	26
3.1.1. Metode Yang Digunakan.....	26
3.1.2. Variabel Penelitian	30
3.2. Teknik Pengumpulan Data	31
3.2.1. Teknik Kepustakaan	31
3.2.2. Teknik Dokumentasi.....	32
3.3. Teknik Analisis Data	33

REFERENSI

VI. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1. Hasil Penelitian.....	36
4.1.1. Sejarah etnis Tionghoa di Indonesia.....	36
4.1.2. Pengusaha Tionghoa Mendominasi Perekonomian.....	38
4.1.3. Relasi antara Pengusaha Tionghoa dan Penguasa Orde Baru	44
4.1.4. Status Kewarganegaraan dan Sentimen anti-Tionghoa	48
4.1.5. Implementasi Kebijakan Asimilasi Terhadap etnis Tionghoa	53
4.1.6. Praktik Korupsi Pengusaha Tionghoa Saat Krisis Ekonomi	58
4.1.7. Pemukiman Yang Terpisah	61
4.1.8. Kerusuhan Mei 1998 di Jakarta.....	64
4.2. Pembahasan.....	71

REFERENSI

V. KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan.....	80
5.2. Saran.....	81

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Sepuluh Konglomerat Indonesia Tahun 1990.....	42
Tabel 2. Persekutuan Bisnis Birokrat dan Pengusaha Tionghoa	46
Tabel 3. Kronologi dan kawasan Kerusuhan Mei 1998 di Jakarta	65
Tabel 4. Jenis Bangunan yang Rusak dalam Kerusuhan Mei 1990	68
Tabel 5. Laporan Jumlah Korban Tewas dan Korban Luka-Luka.....	69
Tabel 6. Korban Perkosaan dan Pelecehan Seksual.....	70

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 : Rencana judul penelitian kaji tindak/skripsi

Lampiran 2 : Rekomendasi pembahas

Lampiran 3 : Surat izin penelitian di Arsip Nasional Republik Indonesia

Lampiran 4 : Surat telah melakukan penelitian di Arsip Nasional Republik

Indonesia

Lampiran 5 : Undang-Undang No.1 Tahun 1967

Lampiran 6 : Ketetapan MPRS Republik Indonesia No. XXVI Tahun 1966

Lampiran 7 : Undang-Undang No.3 Tahun 1946

Lampiran 8 : Berita Antara 18 April 1946

Lampiran 9 : Undang-Undang Warga Negara Tahun 1946

Lampiran 10 : Ketetapan MPRS No. XXV Tahun 1966

Lampiran 11 : Laporan TGPF 1998

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Munculnya era Orde Baru di bawah kekuasaan Presiden Soeharto pada tahun 1966 memunculkan adanya pemikiran untuk kembali pada semangat UUD 1945 dikarenakan paradigma pembangunan yang lebih menonjolkan kebebasan politik bagi warga negara menyebabkan adanya penyelewengan kepada semangat UUD 1945 dan Pancasila pada masa Orde Lama. Oleh karena itu pemerintah Orde Baru menerapkan strategi stabilitas politik dan pertumbuhan (ekonomi).

Sejak dimulainya masa Orde Baru, pemerintah mulai fokus untuk memulihkan kondisi politik dan perekonomian negara akibat berbagai kesulitan ekonomi domestik, tingkat inflasi yang tinggi, dan beban luar negeri yang sangat berat peninggalan pemerintahan Presiden Soekarno. Pemerintah Orde Baru kemudian menerapkan beberapa kebijakan dalam upaya peningkatan ekonomi dan stabilitas politik di Indonesia. Adapun upaya dalam menciptakan stabilitas politik di Indonesia pemerintah Orde Baru memberikan peran ganda kepada ABRI (Angkatan Bersenjata Republik Indonesia), yakni peran Hankam (Pertahanan dan Keamanan) dan Sosial, peran ganda tersebut kemudian dikenal dengan nama Dwi Fungsi ABRI. Selanjutnya dalam upaya meningkatkan pembangunan dan perekonomian negara pemerintah Orde Baru menerapkan kebijakan Repelita (Rencana Pembangunan Lima Tahun). Seiring berjalannya waktu, Indonesia

berhasil meningkatkan stabilitas keamanan negara dan peningkatan pembangunan dan ekonomi.

“Indonesia dapat memperoleh pujian dari pihak Bank Dunia dan Dana Moneter Internasional (IMF) atas keberhasilan pertumbuhan perekonomiannya yang fantastis (di atas 7 persen), bahkan sempat memperoleh julukan sebagai “*the miracle of Asia*” (setelah Singapura dan Thailand)” (Fredy B.L Tobing, 2013:4).

Iskandar Syah menyebutkan keberhasilan-keberhasilan yang dapat dicapai oleh pemerintahan Orde Baru adalah sebagai berikut :

1. Perkembangan GDP Per Kapita Indonesia yang pada tahun 1968 hanya AS\$ 70 dan pada tahun 1996 telah mencapai lebih dari AS\$ 1.000
 2. Sukses transmigrasi, yang disertai segala dampak negatifnya
 3. Sukses program KB (Keluarga Berencana)
 4. Sukses memerangi buta huruf
 5. Sukses dalam swasembada pangan
 6. Pengangguran yang minimum
 7. Sukses program REPELITA (Rencana Pembangunan Lima Tahun)
 8. Sukses Gerakan Wajib Belajar
 9. Sukses Gerakan Nasional Orang Tua Asuh
 10. Keamanan dalam negeri terjaga
 11. Investor asing mau menanamkan modal di Indonesia
 12. Sukses menumbuhkan nasionalisme dan cinta produk dalam negeri.
- (Iskandar Syah, 2016:184)

Setelah melalui beberapa dekade, pada tahun 1997 Indonesia mengalami krisis Moneter. Mahdi Mahmudy menyatakan bahwa Krisis Asia yang dipicu pertama kali devaluasi Thai Baht pada awal Juli tahun 1997, kemudian dikenal dengan “Tom Yum Effect”, telah membawa gelombang jatuhnya mata uang, serta melemahnya pasar modal negara-negara tetangganya seperti Malaysia, Korea, Philipina, serta Indonesia (Mahdi Mahmudy, 2003:186)

“Krisis ekonomi yang terjadi di Indonesia sejak pertengahan 1997 pada mulanya dirasakan sebagai efek penularan dari krisis moneter di kawasan Asia Tenggara. Awalnya adalah ketika pemerintah Thailand, pada 2 Juli 1997, mendevalusi mata uangnya, baht. Sekitar dua minggu kemudian rupiah mulai melemah, dan terus anjlok sampai nilai kursnya pernah mencapai sekitar Rp 15.000,00 per dolar AS di awal 1998. Krisis nilai

tukar rupiah ini kemudian diikuti dengan krisis ekonomi secara keseluruhan, yang semula dirasakan terjadi pada sektor perbankan” (Zaim Saidi, 1998:17).

Ketika sedang mengalami krisis, pemerintah Orde Baru tidak hanya berpangku tangan saja. Pemerintah Orde Baru berusaha untuk mengatasi krisis moneter tersebut. Fredy B.L Tobing menyatakan bahwa Bank Indonesia (BI) telah berupaya mempertahankan nilai mata uang rupiah dengan melakukan kontrol berupa pembatasan transaksi pasar dengan cara melebarkan rentang nilai rupiah dan untuk itu BI telah mengeluarkan dana sebesar 500 juta dollar AS (Fredy B.L Tobing, 2013:15).

“Namun, BI pada akhirnya tidak mampu lagi untuk meneruskan kebijakan tersebut. Setelah menyadari ketidakmampuan dalam mengatasi krisis moneter, pada tanggal 8 Oktober 1997 pemerintah Orde Baru akhirnya meminta bantuan kepada pihak Dana Moneter Internasional (IMF). Salah satu kebijakan yang diterapkan atas saran dari IMF adalah penutupan 16 bank yang tidak sehat” (Fredy B.L, 2013:5,6).

Namun, lagi-lagi tidak sesuai dengan apa yang diharapkan dimana kebijakan tersebut diterapkan untuk membawa dampak positif ternyata justru memperburuk keadaan karena malah menimbulkan reaksi pasar yang negatif. Masyarakat menjadi panik dan beramai-ramai menarik simpanannya dari bank-bank yang akan ditutup. Berbagai kebijakan yang telah diterapkan oleh pemerintah Orde baru dalam mengatasi krisis moneter tidak berjalan dengan baik sehingga tetap berlanjut dan berkembang menjadi krisis ekonomi. Bahkan, dari krisis ekonomi tersebut memunculkan krisis kepercayaan yang semakin besar terhadap pemerintahan Presiden Soeharto.

Semakin jatuhnya nilai rupiah membuat panik masyarakat kalangan menengah ke atas. Mereka mulai memborong sembako di pasar-pasar tradisional secara besar-besaran dan serempak. Hal tersebut membuat harga sembako melambung tinggi, sedangkan masyarakat kalangan bawah semakin kesulitan dan menderita untuk memenuhi kebutuhan sembako mereka. Kenaikan harga yang drastis menimbulkan kepanikan yang luar biasa pada masyarakat kalangan bawah. Ternyata sebagian besar mahasiswa merupakan korban dari krisis moneter tersebut, dimana tidak sedikit dari mereka tidak sanggup lagi untuk melanjutkan kuliah dan memenuhi kebutuhan mereka sehari-hari. Peter Kasenda mengatakan bahwa secara umum mahasiswa mengalami krisis ekonomi melalui terhentinya kiriman orang tuanya, melonjaknya harga beras, biaya fotocopi, bahan praktikum, dan lain-lain (Peter K, 2015:110).

“Krisis di Indonesia mengakibatkan tingginya tingkat pengangguran, meningkatnya jumlah orang yang berada di bawah garis kemiskinan yang berdasarkan perkiran Bank Dunia sekitar 45 juta atau 21% dari total penduduk. Disamping itu, dalam tahun 1998 perekonomian Indonesia diperkirakan mengalami pertumbuhan negatif 13%-15%” (Mahdi Mahmudy, 2003:191).

Semakin menderitanya masyarakat kalangan bawah serta mahasiswa mengakibatkan keresahan mereka semakin besar pula. Ancaman akan putus kuliah dan masa depan yang suram dikalangan mayoritas mahasiswa menjadi keprihatinan bagi mahasiswa dan kalangan kampus. Hal tersebut membuat mahasiswa melakukan demonstrasi. Mereka menuntut dilakukannya reformasi (perubahan secara drastis untuk perbaikan dalam bidang sosial, politik, ekonomi, hukum). Gerakan reformasi yang dilakukan oleh mahasiswa mendapat dukungan dari para dosen dan guru besar mereka di berbagai perguruan tinggi yang berupa

pernyataan untuk mengajak kepada seluruh perguruan tinggi, para cendekiawan, kelompok profesional, dan organisasi kemasyarakatan untuk mendukung gerakan reformasi yang dituntut mahasiswa. Seiring meningkatnya gerakan mahasiswa, dukungan dari berbagai elemen masyarakatpun meningkat. Dukungan mulai berdatangan dari elite politik, organisasi non pemerintah, buruh, dan rakyat. Dukungan tersebut membantu mahasiswa memperkuat landasan argumentasi dalam melakukan gerakan reformasi.

Jika direkapitulasi, ada 6 tuntutan reformasi antara lain:

- (1) Penegakan Supremasi Hukum
- (2) Pemberantasan KKN. Reformasi Birokrasi sebagai syarat Pemberantasan KKN
- (3) Pengadilan mantan Presiden Soeharto dan kroninya
- (4) Amendemen konstitusi. Upaya amendemen UUD Negara RI Tahun 1945 tidak hanya memperjuangkan penguatan Dewan Perwakilan Daerah (DPD), tetapi bertujuan mewujudkan kedaulatan rakyat. Hal yang perlu dilakukan adalah mengkaji ulang hasil amendemen keempat UUD 1945 sehingga perubahan lebih komprehensif guna mewujudkan cita-cita negara yang ingin dicapai
- (5) Pencabutan dwifungsi TNI/Polri
- (6) Pemberian otonomi daerah seluas-luasnya. Konsep otonomi daerah yang dilakukan oleh Negara Indonesia
(Yongky Gigih P, 2016:13)

Reformasi 1998 membuat sistem politik rezim Orde Baru, sistem sosial-ekonomi, lembaga-lembaga negara yang KKN yang ada pada masa pemerintahan Presiden Soeharto menjadi terbuka kepada publik. Kegagalan pemerintahan Soeharto dalam menjaga keamanan perekonomian nasional menjadi pemicu atas ketidakpuasan dan kemarahan masyarakat terhadap pemerintah.

Dominasi partai politik tertentu dan terlalu kuatnya kekuatan Presiden yang didukung oleh angkatan bersenjata menjadi kekuatan yang sinergis untuk meredam demokrasi pada masa Orde Baru. Terbelenggunya kebebasan

berpendapat dan berbagai pelanggaran HAM telah menjadi fenomena yang menyimpan konflik dalam masyarakat. Tingginya kesenjangan sosial antara kelas atas dan kelas bawah menjadi konflik terpendam antar etnis yang kapan saja bisa meledak.

Ketika krisis masih berlangsung, Presiden Soeharto tetap melakukan pengangkatan Kabinet Pembangunan yang dinilai masyarakat terkena skandal KKN dan Presiden Soeharto tetap dilantik menjadi Presiden yang ketujuh. Hal tersebut membuat setiap lapisan masyarakat Indonesia tidak terima ditambah keadaan ekonomi masyarakat semakin memburuk dan ingin pemerintahan yang bersih dari KKN, serta menginginkan reformasi. Masyarakat Indonesia tidak percaya lagi kepada Pemerintah Orde Baru karena tidak berhasil menanggulangi krisis yang sedang terjadi..

“Keadaan semakin memanas dan hampir setiap hari ada demonstrasi mahasiswa di berbagai kota. Hal ini mendorong aparat keamanan untuk bersikap keras terhadap mahasiswa, apalagi sejak mereka berani turun ke jalan. Pada 12 Mei 1998 ribuan mahasiswa Universitas Trisakti melakukan demonstrasi menolak pemilihan kembali Soeharto sebagai Presiden. Mereka juga menuntut pemulihan keadaan ekonomi Indonesia yang dilanda krisis sejak 1997” (Taufik A.S, 2016:101).

Tanggal 12 Mei 1998 terjadi demonstrasi besar-besaran di Jakarta. Saat itulah peristiwa Trisakti meletus. Saat terjadi kerusuhan dimana-mana situasi menjadi tidak terkendali. Apalagi pada peristiwa Trisakti meletus, empat mahasiswa Universitas Trisakti meninggal akibat bentrok dengan aparat keamanan. Empat mahasiswa tersebut adalah Elang Mulya Lesmana, Hery Herianto, Hendriawan Sie, dan Hafidhin Royan. Peristiwa tersebut menambah kemarahan dari mahasiswa dan semakin gencar melakukan demonstrasi. Gejolak dari peristiwa

tersebut ternyata membawa dampak buruk bagi bangsa Indonesia termasuk salah satunya etnis Tionghoa, mereka juga menjadi korban atas kerusuhan tersebut.

Konsentrasi kerusuhan terbesar terjadi di Jakarta yang kemudian merambah ke beberapa daerah lainnya. Rumah-rumah, toko, segala yang dianggap sebagai milik dari etnis Tionghoa dirusak dan dijarah. Peter K menyebutkan bahwa Tim Usakti selama survei mencatat sekita 700 gedung luluh lantak yang terdiri dari 218 toko, 165 ruko, 155 bank, 91 perkantoran, 32 pusat pertokoan, 2 menara apartemen di Pluit, 21 rumah, dan beberapa gudang serta hotel (Peter K, 2015:9).

Selama kerusuhan berlangsung, pemukiman yang mayoritas dihuni oleh masyarakat Tionghoa juga ikut mengalami kerusakan. Menjelang sore, di wilayah Jembatan Sempit Angke, Jembatan Dua, Jembatan Tiga, dan Jembatan Besi terjadi kerusuhan berupa perusakan dan penghancuran disertai dengan isu rasial anti-Tionghoa. Massa mulai menjarah rumah warga dan beberapa toko, bahkan dibakar (Peter K, 2015:146).

“Wilayah Pecinan mengalami kerusakan parah. Daerah Glodok, yang paling tua dibangun pada tahun 1974 setelah kerusuhan anti-Tionghoa mengalami perusakan. Termasuk rumah cukong Soeharto, Liem Sioe Liong. Begitu pula wilayah Kota sampai Senen lewat Mangga Besar dan Pasar Baru yang merupakan wilayah hunian etnis Tionghoa pertama. Wilayah lain yang mengalaminya adalah Ciledug, di sebelah barat Kebayoran. Kerusuhan juga melanda dari Grogol sampai Cengkareng sepanjang Jalan Daan Mogot. Perusakan terjadi terjadi pula di perumahan yang lebih baru di Pluit” (Peter K, 2015:164).

“Adapun data korban yang sesuai dengan kategori TGPF dirinci sebagai berikut:

Jumlah korban perkosaan dengan penganiayaan tercatat 14 orang korban yakni yang diperoleh dari keterangan dokter tiga orang korban, yang diperoleh dari keterangan saksi mata (keluarga) 10 orang korban, dan yang diperoleh dari keterangan konselor satu orang korban. Korban

penyerangan/penganiayaan seksual tercatat sebanyak 10 orang korban, dengan rincian diperoleh dari keterangan korban tiga orang korban, yang diperoleh dari keterangan rohaniawan tiga orang korban, yang diperoleh dari keterangan saksi (keluarga) tiga orang korban, dan yang diperoleh dari keterangan dokter satu orang korban. Jumlah korban pelecehan seksual tercatat sebanyak sembilan orang korban dengan rincian, yang diperoleh dari keterangan saksi delapan orang korban (dari Jakarta dan Surabaya)” (Wibowo, 2000:243).

Berdasarkan data-data yang telah dikumpulkan oleh Tim Gabungan Pencari Fakta, bahwa disimpulkan korban kekerasan seksual tidak semuanya orang-orang keturunan Tionghoa, namun sebagian besar kasus kekerasan seksual Kerusuhan 13-15 Mei 1998 diderita oleh perempuan keturunan Tionghoa.

Tanggal 16 Mei 1998 mahasiswa dari berbagai kampus di Jakarta mulai bergerak menuju gedung DPR/MPR. Mereka terus berdatangan memenuhi gedung bahkan sampai naik ke atas atap gedung dari waktu ke waktu. Tuntutan yang mereka suarakan adalah Soeharto harus turun dari jabatan presiden.

“Menanggapi aksi reformasi tersebut, Presiden Soeharto berjanji akan *mereshuffle* Kabinet Pembangunan VII menjadi Kabinet Reformasi. Selain itu juga akan membentuk Komite Reformasi yang bertugas menyelesaikan UU Pemilu, UU Kepartaian, UU Susduk MPR, DPR, UU Antimonopoli, dan UU Antikorupsi. Dalam perkembangannya, Komite Reformasi belum bisa terbentuk karena 14 Menteri menolak untuk diikutsertakan dalam Kabinet Reformasi. Adanya penolakan tersebut menyebabkan Presiden Soeharto mundur dari jabatannya” (Adi Sudirman, 2014 : 439).

Presiden Soeharto kemudian mengumumkan mundur sebagai presiden di hadapan wartawan media pada tanggal 21 Mei 1998. Mundurnya Soeharto dari jabatan presiden menandai akhir dari rezim Orde Baru. Hal tersebut membuat rakyat meluapkan kegembiraan mereka dengan berbagai ekspresi di jalan-jalan dan Gedung DPR. Pemimpin yang selanjutnya dilantik menjadi presiden adalah B.J Habbibie yang sebelumnya adalah Wakil Presiden dari Presiden Soeharto. Setelah

menjabatnya sebagai Presiden, B.J Habbibie menyusun enam tuntutan reformasi, yaitu penegakan supremasi hukum, pemberantasan KKN, amandemen konstitusi, adili Soeharto dan kroninya, cabut dwifungsi ABRI/Polri, pemberian otonomi daerah. Gerakan reformasi yang terjadi di Indonesia pada pertengahan tahun 1998 ternyata membawa dampak yang besar bagi Bangsa Indonesia, begitu pula dengan etnis Tionghoa di Indonesia.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah apa sajakah yang melatarbelakangi etnis Tionghoa menjadi korban pada Kerusuhan Mei 1998 di Jakarta?

1.3. Tujuan Penelitian

Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui latar belakang etnis Tionghoa menjadi korban pada Kerusuhan Mei 1998 di Jakarta.

1.4. Kegunaan Penelitian

1.4.1. Bagi Universitas Lampung

Membantu civitas lainnya untuk dijadikan bahan mengembangkan pengetahuan, khususnya mengenai latar belakang etnis Tionghoa menjadi korban pada Kerusuhan Mei 1998 di Jakarta.

1.4.2. Bagi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan

Memberikan sumbangan dalam menganalisa mengenai latar belakang etnis Tionghoa menjadi korban kerusuhan Mei 1998 di Jakarta sebagai tambahan Ilmu Pengetahuan.

1.4.3. Bagi Penulis

Menambah wawasan bagi penulis akan kesejarahan yakni latar belakang etnis Tionghoa menjadi korban pada Kerusuhan Mei 1998 di Jakarta.

1.4.4. Bagi Pembaca

Memperluas pengetahuan akan salah satu sejarah Indonesia yaitu latar belakang etnis Tionghoa menjadi korban pada Kerusuhan Mei 1998 di Jakarta.

1.5. Ruang Lingkup Penelitian

1.5.1. Objek Penelitian

Objek penelitian ini adalah Kerusuhan Mei 1998.

1.5.2. Subjek Penelitian

Subjek penelitian adalah Etnis Tionghoa.

1.5.3. Tempat Penelitian

Tempat penelitian dilakukan di Perpustakaan Nasional Republik Indonesia, Arsip Nasional Republik Indonesia, dikarenakan untuk mengkaji sebuah sejarah diperlukan banyak literature buku guna menunjang penyelesaian penelitian ini.

1.5.4. Waktu Penelitian

Waktu penelitian dilakukan pada tahun 2019.

1.5.5. Konsentrasi Ilmu

Konsentrasi penelitian ini adalah Ilmu Sejarah.

REFERENSI

- Fredy B.LTobing. 2013. *Praktik Relasi Kekuasaan Soeharto dan Krisis Ekonomi 1997-1998*. Jakarta: Penerbit Buku Kompas. Halaman 4
- IskandarSyah. 2016. *Sejarah Nasional Indonesia*. Yogyakarta : Suluh Media. Halaman 184
- Mahdi Mahmudy. 2003. Setahun Krisis Asia : Beberapa Pelajaran yang Dapat Diambil Dari Krisis Tersebut. *Buletin Ekonomi Moneter Dan Perbankan*, 1(2), 185-201.<https://doi.org/10.21098/bemp.v1i2.170>. Halaman 186
- Zaim Saidi. 1998. *Soeharto Menjaring Matahari : Tarik-Ulur Reformasi Ekonomi Orde Baru Pasca-1980*. Bandung : Penerbit Mizan. Halaman 17
- Fredy B.L Tobing, *Op.Cit*. Halaman 15
- Fredy B.L Tobing, *Op.Cit*. Halaman 5,6
- PeterKasenda.2015. *Hari-Hari Terakhir Orde Baru Menelusuri Akar Kekerasan Mei 1998*. Depok : Komunitas Bambu. Halaman 110
- Mahdi Mahmudy, *Op.Cit*. Halaman 191
- Yongky Gigih Prasisko. 2016. Gerakan Sosial Baru Indonesia: Reformasi 1998 dan Proses Demokratisasi Indonesia. *Jurnal Pemikiran Sosiologi Vol. 3 No. 2*.<https://jurnal.ugm.ac.id/jps/article/view/23532>. Halaman 13
- TaufikAdi Susilo. 2016. *Ensiklopedi Presiden Republik Indonesia : Soeharto*. Yogyakarta : AR-RUZZ MEDIA. Halaman 101PeterKasenda, *Op.Cit*. Halaman 162
- Peter Kasenda, *Op.Cit*. Halaman 9
- Peter Kasenda, *Op.Cit*. Halaman 146
- Peter Kasenda, *Op.Cit*. Halaman 164
- I Wibowo. 2000. *Harga yang Harus Dibayar: Sketsa Pergulatan etnis Cina di Indonesia*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama. Halaman 243
- Adi Sudirman. 2014. *Sejarah Lengkap Indonesia Dari Era Klasik Hingga Terkini*. Yogyakarta : Diva Press. Halaman 439

II. TINJAUAN PUSTAKA, KERANGKA PIKIR, DAN PARADIGMA

2.1. Tinjauan Pustaka

2.1.1. Konsep Etnis

Menurut Koentjaraningrat menyatakan konsep yang tercakup dalam istilah suku bangsa adalah suatu golongan manusia yang terikat oleh kesadaran dan identitas akan kesatuan kebudayaan, kesadaran dan identitas tadi sering kali-tetapi tidak selalu-juga dikuatkan oleh kesatuan dan persamaan bahasa(J. Dwi Narwoko dan B. Suyanto, 2011:197).

Para ahli Sosiologi menggunakan istilah kelompok etnik untuk menyebutkan setiap bentuk kelompok yang secara sosial dianggap berada dan telah mengembangkan subkultural sendiri. Dengan kata lain, suatu kelompok etnik adalah kelompok yang diakui oleh masyarakat dan oleh kelompok etnik itu sendiri sebagai suatu kelompok yang tersendiri. Istilah etnik dengan demikian bukan hanya menyangkut kelompok-kelompok ras, melainkan juga menyangkut kelompok-kelompok lain yang memiliki asal-muasal yang sama, dan mempunyai kaitan satu dengan yang lain dalam segi agama, bahasa, kebangsaan, asal daerah, atau gabungan antara faktor yang satu dengan faktor yang lainnya (J. Dwi Narwoko dan B. Suyanto, 2011:197).

Berdasarkan pendapat para ahli, etnis atau suku adalah orang-orang baik individu maupun kelompok yang memiliki kebudayaan tersendiri yang berbeda dengan kelompok lain, terutama terlihat dalam aspek asal usul seseorang maupun kelompok tersebut. Istilah etnis digunakan untuk mengacu pada suatu kelompok, yang menjadi pembeda dengan kelompok lain adalah terletak pada kebudayaannya.

Adapun pengertian ras menurut Kottak (1991) dapat ditinjau dari dua segi; (1) sebagai konstruk sosial (*social construct*); dan (2) konstruk biologis (*biological construct*). Pada umumnya, para ahli menggunakan dua pendekatan ini ketika mempelajari keberagaman biologi/hayati, yakni mengelompokkan sesuatu secara rasial dan menjelaskan perbedaan sesuatu itu secara khusus. Maka demikian pula cara ilmuwan memberikan perhatian kepada ras yang secara teoritis, ras bersifat biologis (*biological race*) adalah sebuah kelompok yang berbeda karena para anggotanya memiliki perangai genetik dan bawaan dari leluhurnya. Mereka meyakini bahwa keberadaan ras itu ada dan sangat penting untuk membedakan orang banyak dalam kebersamaan suatu masyarakat yang secara biologis sama (Alo Liliweri, 2018:13).

Menurut Gill dan Gilbert (1988), ras merupakan pengertian biologis yang menjelaskan sekumpulan orang yang dapat dibedakan menurut karakteristik fisik yang dihasilkan melalui proses reproduksi. Acapkali ras merupakan status sosial yang didefinisikan oleh istilah kebudayaan daripada ras dalam istilah biologis. Kadang-kadang perbedaan antara kelompok etnik itu meliputi lebih dari satu

kebudayaan. Klasifikasi ras dan rasial meliputi tampilan fisik yang juga menjadi dasar untuk membedakan kelompok etnik itu (Alo Liliweri, 2018:13).

Berdasarkan penjelasan di atas dapat dikatakan bahwa etnis lebih mengarah kepada kebudayaan sedangkan ras lebih mengarah kepada persamaan biologis atau bentuk fisik, sehingga ras masuk ke dalam bagian daripada etnis.

2.1.1.1. Konsep Etnis Tionghoa

Menurut Coppel mungkin saja penggunaan istilah ini semula bersifat rasial; Tionghoa Totok berarti orang Tionghoa asli dan murni, sedangkan seorang peranakan berarti orang Tionghoa dari keturunan campuran. Arti kedua mengikuti arti pertama: sejak imigrasi orang Tionghoa ke Indonesia sebelum abad ke-20 hampir semuanya meliputi pria. Oleh sebab itu dianggap bahwa orang Tionghoa Totok lahir di Tiongkok dan orang Tionghoa yang lahir di Indonesia adalah peranakan (Aimee Dawis, 2010:83).

Berdasarkan pengamatan Peacock, orang totok lebih cenderung memasuki dunia usaha dan terpusat pada pengumpulan harta. Oleh sebab itu, mereka sangat menghargai keberanian dagang, sifat hemat, dan mandiri. Sebaliknya, peranakan dipandang menghargai hidup, kedudukan tinggi dalam masyarakat dan rasa aman (Aimee Dawis, 2010:84,85).

Meskipun kedua kelompok etnis Tionghoa ini memiliki perbedaan, tetapi dalam dalam hal asal usul mereka masih dalam akar yang sama, sehingga dapat dikatakan bahwa etnis Tionghoa adalah seseorang yang berasal dari negara

Tiongkok yang tinggal di Indonesia baik dari kaum Tionghoa Totok maupun Tionghoa Keturunan.

Adapun budaya etnis Tionghoa di Indonesia dapat diketahui seperti berikut seperti yang terdapat dalam Wikipedia:

- Bahasa, dari segi bahasa terdapat empat kelompok utama bahasa Tionghoa di Indonesia adalah Hokkien (Min Selatan; Min Nan), Mandarin, Hakka, dan Kantonis. Selain itu, orang-orang Teochew berbicara dengan dialek mereka sendiri yang memiliki tingkat pemahaman yang sama dengan Hokkien.
- Seni pertunjukan, dari segi seni pertunjukan terdapat teater, musik, dan tari.
 - Teater Wayang Potehi merupakan salah satu jenis wayang khas Tionghoa yang berasal dari Tiongkok bagian selatan. Kesenian ini dibawa oleh perantau etnis Tionghoa ke berbagai wilayah Nusantara pada masa lampau dan telah menjadi salah satu jenis kesenian tradisional Indonesia.
 - Musik Gambang Kromong adalah sejenis orkes yang memadukan gamelan dengan alat-alat musik Tionghoa, seperti sukong, tehyan, dan kongahyan. Sebutan gambang kromong diambil dari nama dua buah alat perkusi, yaitu gambang dan kromong.
 - Tari Barongsai adalah tarian tradisional Cina dengan menggunakan sarung yang menyerupai singa. Kesenian barongsai diperkirakan masuk di Indonesia pada abad ke-17, ketika terjadi migrasi besar dari Tiongkok Selatan.
 - Tari Liang liong adalah suatu pertunjukan dan tarian tradisional dalam kebudayaan masyarakat Tionghoa. Tarian ini sering tampil pada waktu perayaan-perayaan tertentu. dalam tarian ini, satu regu orang Tionghoa memainkan naga-nagaan yang diusung dengan belasan tongkat. Penari terdepan mengangkat, menganggukkan, menyorongkan dan mengibas-kibaskan kepala naga-nagaan tersebut yang merupakan bagian dari gerakan tarian yang diarahkan oleh salah seorang penari. Para penari menirukan gerakan-gerakan makhluk naga ini, berkelok-kelok dan berombak-ombak. Gerakan-gerakan ini secara tradisional melambangkan peranan historis dari naga yang menunjukkan kekuatan yang luar biasa dan martabat yang tinggi. Tari naga merupakan salah satu puncak acara dari perayaan imlek di pecinan-pecinan di seluruh Indonesia.
- Perayaan dan Festival, yaitu Imlek, Cap Go Meh, Qingming, Duan Wu, Festival Ronde, Bakar Tongkang.
- Tempat beribadah, Klenteng adalah sebutan ibadah penganut kepercayaan tradisional Tionghoa di Indonesia pada umumnya. Dikarenakan di Indonesia, penganut kepercayaan tradisional Tionghoa sering disamakan sebagai penganut agama Konghucu, maka klenteng dengan sendirinya sering dianggap sama dengan tempat ibadah agama Konghucu. Di beberapa daerah, klenteng juga disebut dengan istilah tokong. Istilah ini diambil dari bunyi suara lonceng yang dibunyikan pada saat menyelenggarakan

Di Indonesia, khususnya di Jakarta masyarakat etnis Tionghoa merupakan pedagang maupun pengusaha. Ketika masa kolonial pun etnis Tionghoa mendominasi di bidang perekonomian, mereka dijadikan sebagai pedagang perantara antara pemerintah Hindia Belanda dengan masyarakat pribumi. Ketika pemerintah Hindia Belanda pergi meninggalkan Indonesia, para penguasa Tionghoa masih memiliki peran ekonomi yang besar di Indonesia. Meskipun dalam kenyataannya tidak semua etnis Tionghoa di Indonesia merupakan kaya raya, tetapi sebagian kecil dari populasi mereka merupakan pemegang kekayaan negara. Peter K menyatakan bahwa isu yang berkembang dan tendensius adalah etnis Tionghoa yang hanya mencakup 2% dari populasi Indonesia telah mengontrol kekayaan negara. Etnis Tionghoa memiliki 9 dari 10 group bisnis di Indonesia dan mengontrol 80% dari aset yang dimiliki 300 perusahaan peringkat atas (Peter K ,2015:31).

Menurut Ignas Kleden (1999) hubungan antaretnis akan menimbulkan permusuhan dan kekerasan jika disertai dominasi politik atau ekonomi oleh etnis yang satu terhadap etnis yang lain. Dominasi itu sendiri mengandung kekerasan struktural karena bukan hubungan setara, tetapi ditandai oleh keunggulan di satu pihak dan ketergantungan di pihak lain. Jika dominasi ini menimbulkan represi langsung dalam bidang politik atau penguasaan aset ekonomi. Maka cepat atau lambat akan muncul perlawanan dari pihak yang ketergantungan atau yang mengalami tekanan. Muaranya adalah jika antara pihak yang menguasai dan pihak yang dikuasai mengalami eskalasi, maka dapat berkembang menjadi kekerasan (Peter K, 2015:12).

2.1.2. Konsep Peristiwa Kerusuhan Mei 1998 di Jakarta

Kerusuhan adalah suatu keadaan yang kacau, ribut, gaduh, dan huru-hara (Sudaryono & Natangsa Surbakti, 2005 : 139-140). Menurut Selo Soemardjan kerusuhan ialah (*chaos*) fisik yang menimpa masyarakat sipil dengan gejala kasat mata berupa bentrokan antar manusia, dari perkelahian massal sampai pembunuhan, penjarahan, dan perusakan berbagai sarana dan prasarana, baik fasilitas pribadi (perumahan, mobil pribadi) maupun fasilitas umum (tempat perbelanjaan, gedung pemerintah, kendaraan umum) ataupun tindak pidana lain (Selo Soemardjan, 1999:11).

Kerusuhan massa/konflik sosial secara langsung akan menimbulkan dampak negatif. Bentrokan, kekejaman, maupun kerusuhan yang terjadi antara individu dengan individu, suku dengan suku, bangsa dengan bangsa, serta agama dengan agama kesemuanya itu akan menimbulkan korban jiwa, materil, spiritual, serta berkobarnya rasa kebencian dan dendam yang akan berdampak pada terhentinya kerja sama diantara keduabelah pihak yang berkonflik, terjadi rasa permusuhan, terjadi hambatan, dan terhentinya kemajuan masyarakat. Kesemuanya itu akan memunculkan kondisi dan situasi disintegrasi sosial yang menghambat pembangunan (Bambang Sugeng, 2011:1).

Berdasarkan pendapat para ahli di atas, dapat dikatakan bahwa kerusuhan adalah suatu keadaan yang kacau (tidak terkendali) yang berupa tindak kekerasan seperti perkelahian, penjarahan, pengrusakan, pembunuhan, dll oleh sekelompok orang

yang menimbulkan dampak negatif dan kerugian. Maka dari itu, sebagai umat manusia yang bijaksanasebaiknya untuk tidak melakukan kerusuhan.

Pada tanggal 12 Mei 1998 terjadi demonstrasi di Jakarta, yang menyebabkan 4 mahasiswa Universitas Trisakti meninggal. Keesokan harinya, terjadi kerusuhan di sejumlah tempat di Jakarta, seperti di Perempatan Jalan Pemuda (pukul 11.00 WIB), Pasar Minggu, Cempaka Putih, Rawamangun, Klender (pukul 11.30 WIB), Kalibata, Pos Pengumben, Grogol (pukul 13.00 WIB). Konflik tersebut dimulai di tengah massa yang membakar ban mobil sebelum memicu kebakaran di toko dan agen mobil. Menurut Syamsul Hadi (2005), pada Kerusuhan 13-15 Mei 1998, pusat-pusat perdagangan milik etnis Tionghoa dijadikan target sasaran utama di sekitar Jakarta. Kerusuhan tersebut memperparah rasa tidak aman masyarakat, memperburuk nilai tukar rupiah, dan menurunkan kekuatan politik Presiden Soeharto (Peter K, 2015:10).

Tidak dapat dipungkiri bahwa etnis Tionghoa di Indonesia yang menjadi salah satu korban atas kerusuhan Mei 1998 di Jakarta. Hal ini yang kemudian menarik perhatian peneliti untuk diteliti, mengenai apa sajakah yang melatarbelakangi etnis Tionghoa menjadi korban pada peristiwa tersebut. Peneliti hanya dapat mengerti suatu hal apabila memahami latar belakang perihal tersebut. Konteks melatarbelakangi pada masalah penelitian ini mengacu pada hal yang menjadi penyebab terjadinya suatu kejadian.

2.1.3. Konsep Pribumi-NonPribumi

Secara resmi pemerintah Hindia Belanda (sejak permulaan abad ke-19) membagi penduduk Hindia Belanda dalam tiga golongan: Eropa, Timur Asing (Cina, Arab, dan lain-lain), dan pribumi (Onghokham, 2008:94). Dengan adanya penggolongan kelas sosial seperti itu memperkuat istilah pribumi dan nonpribumi di Hindia Belanda, serta terdapat perbedaan kebijakan yang dilakukan pemerintah Kolonial terhadap golongan pribumi dan nonpribumi baik dalam bidang sosial, ekonomi, dan lain-lain.

Istilah tersebut bukanlah tidak didukung oleh kenyataan-kenyataan sosial dalam masyarakat, yaitu adanya secara sosiologis dua kelompok warga negara, yaitu “asli” dan “tidak asli”. Adapun perbedaan tersebut disebabkan oleh sebagai berikut seperti yang dikemukakan B.P. Paulus :

- a. Perbedaan ras atau etnik yang tergambar dalam bentuk lahiriah seperti warna kulit, bentuk muka, mata, dan bentuk fisik lainnya, serta didukung oleh perasaan tinggi ras.
- b. Perbedaan kebudayaan yang didukung oleh anggapan bahwa kebudayaan sendirilah yang paling tinggi. Kedua sikap ini menimbulkan sikap hidup/mentalitas menyendiri (eksklusivisme).
- c. Perbedaan kekuatan ekonomi yang didukung oleh pandangan matrealisme.
- d. Perbedaan hukum yang berlaku dapat menimbulkan anggapan bahwa mereka adalah sama kedudukannya dengan golongan Eropa.
- e. Kekuatan-kekuatan asing sebagai pengayom (*Godfather*) yang tercermin dalam masalah kesetiaan dalam tanah air dan bangsa serta kesetiaan terhadap pemerintah negara tempat tinggal (Agus Ngadino, 2009:2-3).

Pemisahan antara pribumi dan nonpribumi merupakan warisan kebijakan pemerintah kolonial Hindia Belanda. Saat itu, pemerintah kolonial tidak ingin membaurkan pribumi dengan nonpribumi, malah sebaliknya mereka menegaskan

pemisahan tersebut. Hal tersebut tidak lain untuk monopoli politik demi mempertahankan kekuasaan pemerintah kolonial di Hindia Belanda.

“Kondisi tersebut pada dasarnya juga sangat dipengaruhi politik hukum Hindia Belanda dengan adanya konfigurasi pemilihan sosial “pri-nonpri”. Dalam masyarakat terdiri dari golongan Eropa, golongan Timur Asing (yang sebagian besar terdiri dari kolektivitas Tionghoa), dan pribumi (*inlanders*) yang merupakan mayoritas penduduk penduduk Hindia Belanda. Struktur sosial masyarakat kolonial ini kemudian disebut sebagai struktur kasta kolonial, yang tidak hanya bermuatan perbedaan dalam status hukum, tetapi juga status sosial ekonomi. Struktur sosial masyarakat kolonial yang demikian ini juga merupakan sumber konflik-konflik laten yang seringkali memunculkan konflik-konflik terbuka. Ketika negara-negara bangsa ini terbentuk dan Belanda meninggalkan Indonesia yang muncul adalah konfigurasi sosial “pri-nonpri” tersebut” (Agus Ngadino, 2009:3).

Adanya ketegasan landasan konstusional atas siapa orang-orang bangsa Indonesia asli baru muncul pada Pasal 4 UU No. 12 Tahun 2006, bahwa bagi setiap Warga Negara Indonesia yang sejak kelahirannya di wilayah negara RI dengan ketentuan yang bersangkutan tidak pernah menerima kewarganegaraan lain atas kehendak sendiri adalah Bangsa Indonesia Asli, hal yang sama juga berlaku terhadap anak yan dilahirkan di wilayah Negara Republik Indonesia sekalipun status kewarganegaraan orangtuanya tidak jelas.

2.2. Kerangka Pikir

Peneliti menggunakan teori yang relevan untuk menentukan arah aktivitas penelitian. Penelitian ini menggunakan teori konflik. Salah satu pemikiran yang mempunyai pengaruh besar terhadap perkembangan teori konflik adalah analisis Marx tentang konflik yang menyatakan bahwa konflik utama yang terjadi di masyarakat adalah konflik antar-kelas (Sindung Haryanto, 2012:42). Konflik antar kelas sosial biasanya berupa konflik yang bersifat vertikal, yaitu konflik antara kelas sosial atas, kelas sosial menengah, dan kelas sosial bawah. Konflik ini

terjadi karena kepentingan yang berbeda antara dua golongan atau kelas sosial yang ada. Konflik sosial sesungguhnya merupakan suatu proses bertemunya dua pihak atau lebih yang mempunyai kepentingan yang relative sama terhadap hal yang sifatnya terbatas.

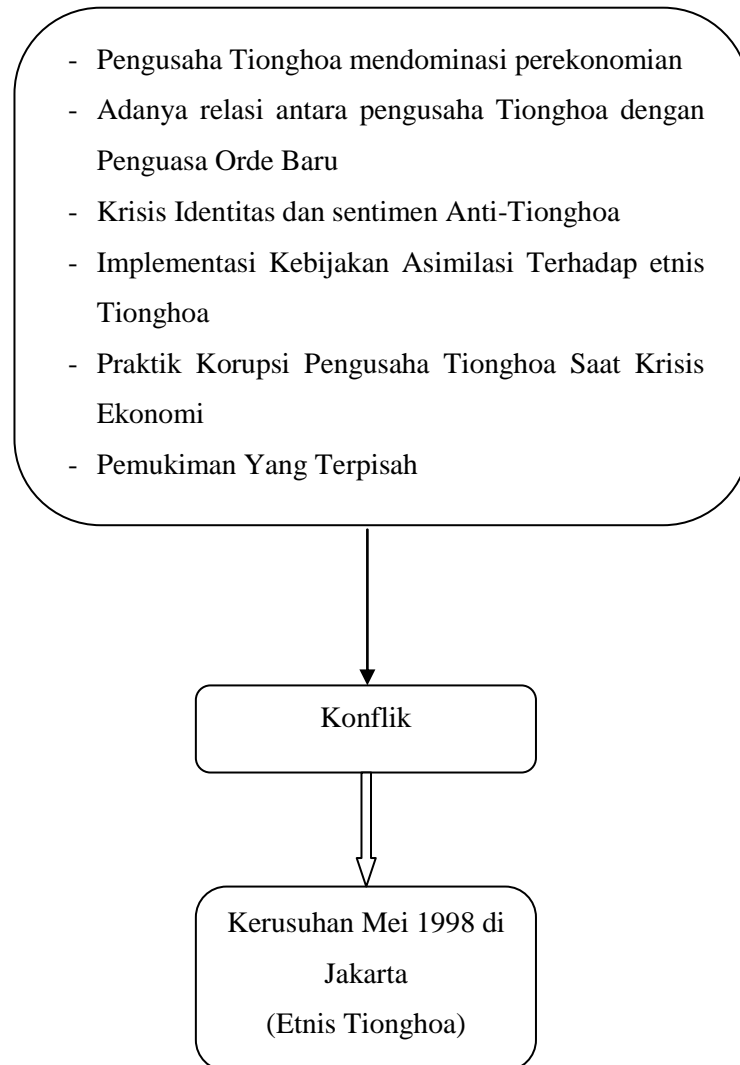
Terciptanya stratifikasi sosial/kelas sosial sejak zaman Belanda mengakibatkan adanya istilah golongan Pribumi dan golongan Nonpribumi, dengan golongan Pribumi merupakan golongan yang paling bawah. Golongan nonpribumi adalah orang-orang Eropa dan orang-orang Timur Asing, sedangkan golongan pribumi adalah orang-orang Indonesia asli. Adanya stratifikasi sosial sejak zaman Belanda ternyata diwariskan hingga masa Orde Baru yang sering kali menimbulkan konflik bahkan hingga kekerasan. Adapun kebijakan yang diterapkan pemerintah Orde Baru terhadap etnis Tionghoa lebih mengarah kearah ekonomi, sosial, dan budaya, karena mereka tidak diperbolehkan ikut terlibat dalam urusan politik.

Kebijakan pemerintah Orde Baru terhadap etnis Tionghoa di Indonesia mengandung dua dimensi, yaitu budaya dan ekonomi. Pemerintah Orde Baru menerapkan kebijakan asimilasi untuk mengatasi permasalahan Tionghoa di Indonesia dengan menghapus tiga pilar budaya Tionghoa yaitu, sekolah, organisasi, dan media Tionghoa. Di bidang ekonomi, etnis Tionghoa diberikan peluang yang baik untuk mengembangkan ekonomi mereka. Apalagi setelah pemerintah membuka pintu bagi masuknya pemodal asing. Hal ini tentunya memberikan pengaruh yang kuat dalam meningkatkan perekonomian di

Indonesia. Pada masa ini, aspirasi etnis Tionghoa lebih mengarah ke aspek bisnis dan ekonomi dibandingkan dengan aspek lainnya karena dianggap lebih menguntungkan bagi etnis Tionghoa dan pemerintah Orde Baru. Seiring dengan berjalannya waktu, perluasan usaha Tionghoa terlihat berkembang pesat pada akhir tahun 1980an. Akibat dari kebijakan tersebut, status ekonomi etnis Tionghoa melejit di atas orang-orang Pribumi.

Permasalahan status kewarganegaraan yang tak kunjung usai hingga berakhirnya kekuasaan Orde Baru membuat orang-orang Tionghoa seolah bayang-bayang di Indonesia dan sentimen anti-Tionghoa yang menyebar di kalangan masyarakat Indonesia menyebabkan orang-orang Tionghoa merasa mereka kurang mendapat keamanan dan isu-isu anti-Tionghoa yang tidak kunjung hilang. Korupsi Kolusi Nepotisme (KKN) yang terang-terangan dan hak-hak istimewa yang diberikan kepada pengusaha Tionghoa terus menerus menimbulkan kecemburuan dari golongan pribumi selama masa pemerintahan Soeharto. Praktik ini menjadi salah satu penyebab Indonesia mengalami krisis ekonomi tahun 1997.

2.3. Paradigma



Keterangan :

→ Latar Belakang

⇒ Akibat

REFERENSI

J. Dwi Narwoko dan Bagong Suyanto. 2011. *Sosiologi Teks Pengantar Dan Terapan*. Jakarta: kencana Prenada Media Group. Halaman 197

Ibid

Alo Liliweri. 2018. *Prasangka, Konflik, dan Komunikasi Antarbudaya* Edisi Kedua. Jakarta: Kencana. Halaman 13

Ibid

Aimee Dawis. 2010. *Orang Indonesia Tionghoa Mencari Identitas*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama. Halaman 83

Ibid., halaman 84,85

Peter Kasenda. 2015. *Hari-Hari Terakhir Orde Baru Menelusuri Akar Kekerasan Mei 1998*. Depok : Komunitas Bambu. Halaman 16

<https://id.m.wikipedia.org/wiki/Tionghoa-Indonesia> diakses pada tanggal 14 Agustus 2019 pukul 12.00 WIB

<https://id.m.wikipedia.org/wiki/Klenteng> diakses pada tanggal 14 Agustus 2019 pukul 12.15 WIB

Ibid., halaman31

Ibid., halaman 12

Sudaryono dan Natangsa Surbakti. 2005. *Buku Pegangan Kuliah Hukum Pidana*. Surakarta: Fakultas Hukum UMS. Halaman 139-140

Selo Soemardjan. 1999. *Kisah Perjuangan Reformasi*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan. Halaman 11

Bambang Sugeng. 2011. *Penanganan Konflik Sosial*. Bandung: Pusat Kajian Bencana dan Pengungsi. Halaman 1

Peter Kasenda, *Op.Cit.* Halaman 10

Agus Ngadino. 2009. *Orang Bangsa Indonesia Asli Dalam Perspektif Hukum Kewarnegaraan*. Simbur Cahaya No. 38 Tahun XIII Januari 2009. Halaman 2

Ibid., halaman 2,3

Ibid., halaman 3

Ibid

Sindung Haryanto. 2012. Spektrum Teori Sosial: dari klasik hingga postmodern.
Jogjakarta: Ar-Ruzz Media. Halaman 42

Ibid., halaman 46

III. METODE PENELITIAN

3.1. Metode Penelitian

Metode dalam penelitian sangat penting untuk menentukan keberhasilan suatu penelitian. Umumnya yang disebut metode adalah cara atau prosedur untuk mendapat objek. Juga dikatakan bahwa metode adalah cara untuk berbuat atau mengerjakan sesuatu dalam system yang terencana dan teratur, sehingga metode selalu erat hubungannya dengan prosedur, proses, atau teknik yang sistematis untuk melakukan penelitian disiplin tertentu (L. Gottschalk 1986:11).

Dalam kamus *The New Luxicon Webster's Dictionary of the English Language*(selanjutnya disebut *The New Luxicon*), metode adalah “suatu cara untuk berbuat sesuatu; suatu prosedur untuk mengerjakan sesuatu; keteraturan dalam berbuat, berencana, dll.; suatu susunan atau sistem yang teratur.” Jadi metode ada hubungannya dengan suatu prosedur, proses, atau teknik yang sistematis dalam penyelidikan suatu disiplin ilmu tertentu untuk mendapatkan objek (bahan-bahan yang diteliti)(Helius Sjamsuddin, 2007:13).

3.1.1. Metode yang digunakan

Berdasarkan metode penelitian, adapun metode yang digunakan untuk mempermudah proses penelitian yang akan dilakukan dikemudian hari adalah metode penelitian historis. Metode Penelitian ini merupakan cara yang menetapkan fakta dan mencapai simpulan mengenai hal-hal yang telah lalu, yang

dilakukan secara sistematis dan objektif oleh ahli sejarah dalam mencari, mengevaluasi, dan menafsirkan bukti-bukti untuk mempelajari masalah baru tersebut. Penelitian ini mencoba merekonstruksi apa yang telah terjadi di masa lampau selengkap dan seakurat mungkin, dan menjelaskan mengapa hal itu terjadi. Dalam mencari data dilakukan secara sistematis agar mampu menggambarkan, menjelaskan, dan memahami kegiatan atau peristiwa yang terjadi di masa lampau. Menurut Louis Gottschalk metode historis adalah proses menguji dan menganalisa secara kritis rekaman dan peninggalan masa lalu (Louis Gottschalk, 1986 : 32).

Penelitian historis merupakan salah satu pendekatan dalam penelitian kualitatif yang bertujuan untuk merekonstruksi kembali secara sistematis, akurat, dan objektif kejadian atau peristiwa yang pernah terjadi di masa lampau dengan menggunakan pendekatan normatif dan interpretatif (Muri Yusuf, 2014:346).

Berdasarkan pendapat para ahli diatas maka metode penelitian sejarah adalah cara atau prosedur yang digunakan peneliti untuk menganalisa kejadian yang terjadi di masa lampau agar dapat merekonstruksi kondisi masa lampau secara objektif, sistematis, kritis, dan akurat. Dari penelitian ini akan dapat dicapai suatu penelitian yang didasarkan pada fakta dan bukti yang aktual dan akurat.

Tujuan penelitian historis adalah membuat rekontruksi masa lampau secara objektif dan sistematis dengan cara mengumpulkan, memverifikasikan, mengintesakan bukti-bukti untuk memperoleh kesimpulan. Terdapat dua sifat data

dalam penelitian historis yang ditentukan oleh sumber datanya untuk mencapai suatu hasil yang validitas dan reabilitas dalam penelitian tersebut.

Budi Koestoro dan Basrowi mengklasifikasikan sifat data historis, yakni :

- Data Primer, yakni data autentik. Data yang langsung dari tangan pertama tentang masalah yang diungkapkan atau data asli.
- -Data Sekunder, yakni data yang mengutip dari sumber lain sehingga tidak bersifat autentik karena sudah diperoleh dari tangan kedua, ketiga dan selanjutnya, atau data tidak asli (Budi Koestoro dan Basrowi, 2006:122).

Menurut Nugroho Notosusanto langkah-langkah dalam penelitian historis, yaitu :

1. Heuristik adalah proses mencari untuk menemukan sumber-sumber sejarah.
2. Kritik adalah menyelidiki apakah jejak sejarah itu asli atau palsu.
3. Interpretasi adalah setelah mendapatkan fakta-fakta yang diperlukan maka kita harus merangkaikan fakta-fakta itu menjadi keseluruhan yang masuk akal.
4. Historiografi adalah suatu kegiatan penulisan dalam bentuk laporan hasil penelitian (Nugroho Notosusanto, 1984:11).

Berdasarkan langkah-langkah tersebut, maka langkah-langkah penelitian yang harus dilakukan oleh peneliti yaitu sebagai berikut :

1. Heuristik

Tahapan pertama yaitu mencari dan mengumpulkan sumber yang berhubungan dengan topik yang akan dibahas. Tahap ini mengarah pada kegiatan pencarian, menemukan, dan pengumpulan sumber-sumber berbagai data yang dapat mengetahui segala bentuk peristiwa atau kejadian sejarah masa lampau yang relevan dengan topik yang akan dibahas. Sumber-sumber yang dimaksud berupa buku, arsip dan dokumen yang relevan dengan judul penelitian, dalam penelitian ini peneliti mencari, mengumpulkan data-data dan fakta yang diperlukan dalam penelitian dengan cara mencari buku-buku maupun dokumen baik bentuk tercetak maupun non-cetak (*e-book*). Sumber tertulis yang dilakukan dengan cara mengunjungi Perpustakaan Nasional Republik Indonesia, Arsip Nasional Republik

Indonesia,.Adapun buku-buku yang didapat seperti Buku *Hari-Hari Terakhir Orde Baru* Karya Peter Kasenda. Buku *Sejarah Lengkap Indonesia Dari Era Klasik Hingga Terkini*Karya Adi Sudirman. Buku *Praktik Relasi Kekuasaan Soeharto dan Krisis Ekonomi 1997-1998* Karya Fredy B.L Tobing. Buku *Pri dan Nonpri Mencari Format Baru Pembauran*karya Moch Sa'dun M. Buku *Warga Baru (Kasus Cina di Indonesia)* karya Siswono Yudo Husodo. Buku *Etnis Tionghoa dan Nasionalisme Indonesia Sebuah Bunga Rampai 1965-2008*karya Leo Suryadinata. Buku *Harga Yang Harus Dibayar Sketsa Pergulatan etnis Cina di Indonesia* karya I. Wibowo. Buku *Anti Cina, Kapitalisme Cina dan Gerakan Cina* karya Onghokham. Buku *Dilema Minoritas Tionghoa* karya Leo Suryadinata. Buku *Indonesia Dalam Arus Sejarah (Orde Baru dan Reformasi)* karya Abdul Syukur, Diana Nomida Musnir, dkk. Buku *Asian Godfathers: Menguak Tabir Perselingkuhan Penguasa dan Penguasanya* Joe Studwell. Buku *Sepak Terjang Para Taipan* karya Sterling Seagrave.

2. Kritik

Tahap selanjutnya setelah mengumpulkan sumber adalah kritik. Terdapat dua macam kritik yaitu kritik eksternal dan kritik internal.Kritik eksternal menyelidiki keaslian terhadap sumber, sehingga peneliti dibutuhkan kemampuan menguji tentang keakuratan dokumen ataupun sumber yang digunakan. Kritik internal menguji isi yang terdapat dalam sumber itu apakah dapat memberikan informasi yang diperlukan, sehingga dibutuhkan proses analisis terhadap suatu dokumen atau sumber yang dibutuhkan.

3. Interpretasi

Setelah melalui tahapan kritik sumber, tahap selanjutnya dilakukan interpretasi atau penafsiran terhadap fakta sejarah yang diperoleh dari arsip, buku-buku yang relevan dengan pembahasan, maupun hasil penelitian langsung dilapangan. Penafsiran fakta harus bersifat logis terhadap keseluruhan konteks peristiwa sehingga berbagai fakta yang lepas satu sama lainnya dapat disusun dan dihubungkan menjadi satu kesatuan yang masuk akal. Tahapan ini harus menghindari penafsiran yang semena-mena karena biasanya bersifat subjektif.

4. Historiografi

Tahapan terakhir yaitu historiografi atau penulisan sejarah. Setelah melakukan langkah-langkah penelitian sebelumnya maka akan diintegrasikan dalam penulisan ini yang menghasilkan suatu hasil penelitian. Penulisan sejarah ini disusun berdasarkan metode penulisan karya ilmiah yang berlaku di Universitas Lampung.

3.1.2. Variabel Penelitian

Menurut Brown (1998:7) variabel didefinisikan sebagai “*something that may vary or differ*”, yang menyatakan bahwa variabel adalah sesuatu yang berbeda atau bervariasi. Definisi lain yang lebih detil mengatakan bahwa variabel “*is simply symbol or concept that can assume any of a set of values*” (Davis, 1998: 23), penekanan kata sesuatu diperjelas dalam definisi kedua yaitu simbol atau konsep yang diasumsikan sebagai seperangkat nilai-nilai (Jonathan Sarwono, 2006:53).

Variabel penelitian merupakan elemen penting dalam suatu penelitian yang harus dianalisa. Variabel diartikan sebagai segala sesuatu yang akan menjadi objek pengamatan penelitian. Sering pula dinyatakan sebagai faktor-faktor yang berperan dalam peristiwa atau gejala yang akan diteliti (Sumadi, 1983:72). Adapun dalam penelitian ini peneliti menggunakan satu variabel yaitu dengan fokus penelitian pada latar belakang etnis Tionghoa menjadi korban pada Kerusuhan Mei 1998.

3.2. Teknik Pengumpulan Data

Suatu penelitian memerlukan teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data merupakan satu tahap yang sangat menentukan terhadap proses dan hasil penelitian yang akan dilaksanakan tersebut. Kesalahan dalam melaksanakan pengumpulan data dalam satu penelitian akan berakibat langsung terhadap proses dan hasil suatu penelitian. Agar data yang kita kumpulkan menjadi valid, maka kita harus mengetahui bagaimana cara-cara pengumpulan data dalam penelitian itu, sehingga data yang kita peroleh dapat menjadi pendukung terhadap kebenaran suatu konsep tertentu.

3.2.1. Teknik Kepustakaan

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu teknik kepustakaan dan dokumentasi. Teknik kepustakaan atau cenderung dikenal sebagai teknik studi pustaka, bila mengacu pada pengertian yang ditulis oleh Jonathan Sarwono, mengemukakan bahwa studi kepustakaan adalah suatu teknik pengumpulan data yang ditulis dengan menelaah teori-teori, pendapat-pendapat, serta pokok-pokok pikiran yang terdapat dalam sebuah media cetak, khususnya buku-buku yang menunjang dan relevan dengan masalah yang dibahas dalam penelitian (Jonathan, 2006:34,35).

Menurut Sugiyono studi kepustakaan berkaitan dengan kajian teoritis dan referensi lain yang berkaitan dengan nilai, budaya dan norma yang berkembang pada situasi sosial yang diteliti, selain itu studi kepustakaan sangat penting dalam melakukan penelitian, hal ini dikarenakan penelitian tidak akan lepas dari literatur-literatur Ilmiah (Sugiyono, 2012:291)

Berdasarkan pendapat para ahli di atas, maka teknik kepustakaan adalah suatu teknik pengumpulan data dengan menggunakan referensi dari buku-buku atau media yang dapat menunjang kajian penelitian yang diteliti oleh peneliti. Maka dari itu, penelitian tentang latar belakang etnis Tionghoa menjadi korban Kerusuhan Mei 1998 di Jakarta ini menggunakan berbagai literatur yang terdapat di ruang kepustakaan.

3.2.2. Teknik Dokumentasi

Teknik dokumentasi apabila dilihat dari pengertian para ahli dapat dikatakan sebagai suatu proses dalam mencari data mengenai hal-hal yang berbentuk catatan, buku, arsip, dll yang dapat memenuhi kebutuhan peneliti. Menurut Suharsimi Arikunto, mengartikan teknik dokumentasi sebagai proses di dalam mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, lengger, agenda dan sebagainya (Suharsimi Arikunto, 2006:231).

Sementara itu, menurut Hadari Nawawi menyatakan bahwa teknik dokumentasi adalah cara pengumpulan data melalui peninggalan tertulis berupa arsip-arsip dan termasuk juga buku-buku tentang pendapat teori, dalil-dalil atau buku-buku lain

yang berkenaan dengan masalah-masalah penyelidikan (Hadari Nawawi, 1991:133).

Berdasarkan pendapat para ahli diatas maka teknik dokumentasi adalah proses mencari dan mengumpulkan data melalui catatan, dokumen, arsip dan lainnya yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Hal ini dilakukan dengan mencari arsip yang berhubungan dengan latar belakang etnis Tionghoa menjadi korban pada Kerusuhan Mei 1998 di Jakarta.

3.3. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis data kualitatif. Menurut Fossey, cs (2002) analisis data kualitatif merupakan proses mereviu dan memeriksa data, meyintesis, dan menginterpretasikan data yang terkumpul sehingga dapat menggambarkan dan menerangkan fenomena atau situasi sosial yang diteliti (Muri Yusuf, 2014 : 400).

Teknik Analisis data merupakan proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan dan dokumentasi dengan cara mengorganisasikan data kedalam kategori, menjabarkan kedalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun kedalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari kemudian membuat kesimpulan (Sugiyono, 2012 : 244).

Berdasarkan pengertian para ahli tersebut, maka teknik analisis data merupakan serangkaian kegiatan pengolahan data yang telah dikumpulkan dari hasil

pengumpulan data yang kemudian dapat menjawab permasalahan yang diteliti sehingga dapat disimpulkan menjadi suatu hasil penelitian yang dapat dipahami bagi diri sendiri maupun orang lain.

Terdapat beberapa langkah dalam melakukan analisis data, yaitu:

1. Penyusunan Data. Penyusunan data dilakukan untuk membantu memudahkan penelitian terhadap semua data yang diperlukan dalam penelitian, dimana selanjutnya ditindaklanjuti melalui seleksi setelah mendapatkan data-data yang relevan.
2. Klarifikasi Data, dalam hal ini data-data yang telah ditemukan kemudian diklarifikasi dengan cara menggolongkan data sesuai dengan sub-sub permasalahan yang relevan dengan penelitian.
3. Penggolongan Data. Setelah data diperoleh dan diklarifikasi kemudian diseleksi kembali melalui teknik analisis kualitatif. Diseleksi dalam hal ini berarti menggolongkan dan mengatur data yang telah ditemukan, maksudnya agar data-data yang menjadi sumber penelitian tersebut kemudian diolah dalam tahap penginterpretasian, penganalisaan lebih lanjut hingga pada tahap penarikan kesimpulan.
4. Penyimpulan Data, sebagai langkah akhir dalam penelitian merupakan penarikan suatu kesimpulan dari hasil kerja penelitian yang telah dilakukan melalui prosedur ilmiah yang kemudian dituangkan dalam bentuk laporan (Muhammad Ali, 1998:152).

REFERENSI

- LouisGottschalk. 1986. *Mengerti Sejarah (terjemahan)*. Jakarta: Universitas Indonesia Press. Halaman 11
- HeliusSjamsuddin. 2007. *Metodologi Sejarah*. Yogyakarta: Penerbit Ombak. Halaman 13
- Ibid*
- Louis Gottschalk, *Op.Cit.* Halaman 32
- MuriYusuf. 2014. *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Penelitian Gabungan*. Jakarta: Prenamedia Group. Halaman 346
- Budi Koestoro dan Basrowi. 2006. *Strategi Penelitian Sosial dan Pendidikan*. Surabaya: Yayasan Kampusina. Halaman 122
- NugrohoNotosusanto. 1984. *Masalah Penelitian Sejarah Kontemporer (Suatu Pengalaman)*. Jakarta : Yayasan Penerbit Universitas Indonesia. Halaman 11
- JonathanSarwono. 2006. *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*. Yogyakarta: Graha Ilmu. Halaman 53
- Sumadi SuryaBrata. 1983. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Rajawali. Halaman 72
- Jonathan Sarwono, *Op.Cit.* Halaman 34,35
- Sugiyono. 2012. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung : Alfabeta. Halaman 291
- SuharsimiArikunto. 2006. *Prosedur Penelitian : Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta : PT. Rineka Cipta. Halaman 231.
- Hadari Nawawi. 1991. *Metodologi Penelitian Bidang Sosial*. Yogyakarta : UGM Press. Halaman 133
- MuriYusuf, *Op.Cit.* Halaman 400
- Sugiyono,*Op.Cit.* Halaman 244
- MuhammadAli.1998.*Strategi Penelitian Pendidikan*.Jakarta : Angkasa. Halaman 152.

V. KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis data yang telah tertulis dalam bab di atas, maka penulis memperoleh hasil data yang dapat disimpulkan bahwa terdapat sebab-sebab apa sajakah yang melatarbelakangi etnis Tionghoa menjadi Korban pada Kerusuhan Mei 1998 di Jakarta yaitu :

1. Kebijakan UUPMA (Undang-Undang Penanaman Modal Asing) tahun 1967 yang menyebabkan perekonomian etnis Tionghoa meleset di atas orang-orang pribumi yang disertai dengan adanya relasi antara pengusaha Tionghoa dengan pemerintah Orde Baru, sehingga mereka mampu menguasai perekonomian di Indonesia.
2. Peraturan tentang Status kewarganegaraan etnis Tionghoa dan sentimen anti Tionghoa. Permasalahan status kewarganegaraan etnis Tionghoa yang tak kunjung usai pada masa Orde Baru membuat mereka kesulitan dalam kehidupan bernegara yang disertai dengan sentimen anti-Tionghoa yang meluas dikalangan masyarakat, sehingga mereka merasa keberadaan mereka kurang aman.
3. Implementasi kebijakan asimilasi terhadap etnis Tionghoa diterapkan pemerintah Orde Baru juga tidak sepenuhnya bisa menyelesaikan permasalahan etnis Tionghoa di Indonesia, yang menyebabkan mereka masih memiliki sifat yang eksklusif dan masih adanya sentimen anti-Tionghoa di kalangan masyarakat.

4. Relasi antara penguasa dan pengusaha pada masa Orde Baru, hak-hak istimewa yang diberikan kepada pengusaha Tionghoa membuat mereka memiliki akses kemudahan dalam menjalankan dan mengembangkan bisnis. Hal ini menjadi suatu hubungan yang tidak sehat yang membuat masyarakat menaruh perasaan tidak suka terhadap keduanya.
5. Praktik korupsi yang dilakukan oleh para pengusaha Tionghoa yang secara tidak langsung ikut membuat Indonesia jatuh ke dalam kondisi krisis ekonomi dan tak kunjung pulih pada tahun 1997-1998. Hal tersebut membuat masyarakat Indonesia memiliki konflik terpendam terhadap etnis Tionghoa dan juga pemerintah Orde Baru.
6. Adanya permukiman terpisah yang penghuninya adalah mayoritas etnis Tionghoa membuat tempat tinggal mereka mudah untuk di kenali, sehingga ketika kerusuhan terjadi terdapat beberapa wilayah yang dirusak dan dijarah yang diidentifikasi sebagai wilayah pemukiman mereka.

5.2. Saran

Bangsa Indonesia telah mengalami peristiwa kelam pada saat jatuhnya masa Orde Baru yang hanya menyisakan luka dan penderitaan. Seperti halnya dengan etnis Tionghoa yang ikut berpartisipasi dalam pertumbuhan ekonomi di Indonesia selama masa Orde Baru. Meskipun peran mereka sangat penting dalam perekonomian, namun pada akhir masa kekuasaan Orde Baru mereka menjadi korban atas kerusuhan yang terjadi di Indonesia. Saran dari penulis dalam penelitian ini adalah, sebagai berikut :

1. Bagi peneliti lain

Perlunya penelitian lebih lanjut mengenai latar belakang etnis Tionghoa menjadi korban pada Kerusuhan Mei 1998, karena masih banyak yang dapat dikaji lebih lanjut agar memperoleh gambaran yang lebih jelas pada latar belakang etnis Tionghoa menjadi korban pada Kerusuhan Mei 1998.

2. Bagi Pembaca

Diharapkan pembaca dapat mengerti tentang latar belakang etnis Tionghoa menjadi korban Kerusuhan Mei 1998 di Jakarta. Dapat dijadikan pemahaman dan pembelajaran bagi siapapun, agar hal-hal semacam ini tidak terulang lagi. Menjadi bahan refleksi untuk kita ke depannya bagaimana cara kita untuk bertindak demi kesejahteraan kita bersama di dalam bangsa Indonesia.

3. Bagi Pemerintah

Diharapkan dengan adanya tulisan ini dapat menjadi pertimbangan bagi pemerintah dalam mengambil dan menerapkan kebijakan dalam bidang ekonomi dan sosial untuk masyarakat Indonesia yang lebih baik dan harmonis.

DAFTAR PUSTAKA

- Adi Susilo, Taufik. 2016. *Ensiklopedi Presiden Republik Indonesia : Soeharto*. Yogyakarta : Ar-Ruzz Media.
- Ali, Muhammad. 1998. *Strategi Penelitian Pendidikan*. Jakarta : Angkasa.
- Arikunto, Suharsimi. 2006. *Prosedur Penelitian : Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta : PT. Rineka Cipta.
- Brata, Sumadi Surya. 1983. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Rajawali.
- Christina, Mega. 2006. *SBKRI No Way Untuk Masa Depan Tanpa Diskriminasi*. Yappika Aliansi Masyarakat Sipil Untuk Demokrasi.
- Dawis, Aimee. 2010. *Orang Indonesia Tionghoa Mencari Identitas*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Djafkar, Muhammad. 2012. *Etika Bisnis: Menangkap Spirit Ajaran Langit dan Pesan Moral Ajaran Bumi*. Jakarta: Penebar Plus.
- Gottschalk, Louis. 1986. *Mengerti Sejarah (terjemahan)*. Jakarta: Universitas Indonesia Press. Haryanto, Sindung. 2012. *Spektrum Teori Sosial: dari klasik hingga postmodern*. Jogjakarta: Ar-Ruzz Media.
- Husodo, Siswono Yudo. 1985. *Warga Baru (Kasus Cina di Indonesia)*. Jakarta: Lembaga Penelitian Yayasan Padamu Negeri.
- Kasenda, Peter. 2015. *Hari-Hari Terakhir Orde Baru Menelusuri Akar Kekerasan Mei 1998*. Depok : Komunitas Bambu.
- Koestoro, Budi dan Basrowi. 2006. *Strategi Penelitian Sosial dan Pendidikan*. Surabaya: Yayasan Kampusina.
- Liliweri, Alo. 2018. *Prasangka, Konflik, dan Komunikasi Antarbudaya Edisi Kedua*. Jakarta: Kencana.
- Narwoko, J. Dwi, Bagong Suyanto. 2011. *Sosiologi Teks Pengantar Dan Terapan*. Jakarta: kencana Prenada Media Group.
- Nawawi, Hadari. 1991. *Metodologi Penelitian Bidang Sosial*. Yogyakarta : UGM Press.
- Notosusanto, Nugroho. 1984. *Masalah Penelitian Sejarah Kontemporer (Suatu Pengalaman)*. Jakarta : Yayasan Penerbit Universitas Indonesia.
- Onghokham. 2005. *Riwayat Tionghoa Peranakan di Jawa*. Jakarta: Komunitas Bambu.

- Onghokham. 2008. *Anti Cina, Kapitalisme Cina dan Gerakan Cina: Sejarah Etnis Cina di Indonesia*. Jakarta: Komunitas Bambu.
- Pamungkas, Sri Bintang. 2014. *Ganti Rezim Ganti Sistem: Pergulatan Menguasai Nusantara*. Jakarta: El Bisma.
- Saidi, Zaim. 1998. *Soeharto Menjaring Matahari : Tarik-Ulur Reformasi Ekonomi Orde Baru Pasca-1980*. Bandung : Penerbit Mizan.
- Santoso,F. Harianto. 2002. "Kenapa Indonesia Kolaps?" dalam, *Indonesia dalam Krisis 1997-2002*. Jakarta: Kompas.
- Sarwono, Jonathan. 2006. *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Seagrave,Stering. 2015. *Sepak Terjang Para Taipan*. Tangerang: PT Pustaka Alvabet Anggota Ikapi.
- Sjamsuddin, Helius. 2007. *Metodologi Sejarah*. Yogyakarta: Penerbit Ombak.
- Soemardjan, Selo. 1999. *Kisah Perjuangan Reformasi*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- Studwell, Joe. 2015. *Asian Godfathers: Menguak Tabir Perselingkuhan Penguasa dan Penguasa*. Jakarta: PT Pustaka Alvabet Anggota IKAPI.
- Sudaryono dan Natangsa Surbakti. 2005. *Buku Pegangan Kuliah Hukum Pidana*. Surakarta: Fakultas Hukum UMS.
- Sudirman, Adi. 2014. *Sejarah Lengkap Indonesia Dari Era Klasik Hingga Terkini*. Yogyakarta : Diva Press.
- Sugeng, Bambang. 2011. *Penanganan Konflik Sosial*. Bandung: Pusat Kajian Bencana dan Pengungsi.
- Sugiyono. 2012. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung : Alfabeta.
- Sumual, David E.. 1996. *Pengusaha Etnis Cina Sepanjang Sejarah Perekonomian Indonesia dan Masalah-Masalahnya*. Mini Economica. No. 25 (Juli-oktober 1996).
- Suryadinata, Leo. 1984. *Dilema Minoritas Tionghoa*. Jakarta: PT Temprint.
- Suryadinata, Leo. 2010. *Etnis Tionghoa dan Nasionalisme Indonesia*. Jakarta: Kompas.

Suryomenggolo, J. 2003. *Hukum Sebagai Alat Kekuasaan: politik asimilasi Orde baru*. Jakarta: Galang Press, Elkasa.

Syah, Iskandar. 2016. *Sejarah Nasional Indonesia*. Yogyakarta : Suluh Media.

Syukur, Abdul, Diana Nomida M, dkk. 2012. *Indonesia Dalam Arus Sejarah: Orde Baru dan Reformasi*. PT Ichtiar Baru Van Hoeve atas kerja sama dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia.

Tobing, Fredy B.L. 2013. *Praktik Relasi Kekuasaan Soeharto dan Krisis Ekonomi 1997-1998*. Jakarta: Penerbit Buku Kompas.

Wanandi, Jusuf. 2014. *Menyibak Tabir Orde Baru: Memoar Politik Indonesia 1965-1998*. Jakarta: PT Kompas Media Nusantara.

Wibowo, I. 2000. *Harga yang Harus Dibayar: Sketsa Pergulatan etnis Cina di Indonesia*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.

Wibowo, I dan Thung Ju Lan. 2010. *Setelah Air Mata Kering: Masyarakat Tionghoa Pasca-Peristiwa Mei 1998*. Jakarta : Kompas.

Wirawan, Yerry. 2000. *Dinamika Ekonomi Politik Awal Orde Baru: 1966-1968*. Jakarta: Skripsi Program Studi Sejarah Fakultas Sastra Universitas Indonesia.

Yusuf, Muri. 2014. *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Penelitian Gabungan*. Jakarta: Prenamedia Group.

Sumber jurnal :

Mahmudy, Mahdi. 2003. Setahun Krisis Asia : Beberapa Pelajaran yang Dapat Diambil Dari Krisis Tersebut. *Buletin Ekonomi Moneter Dan Perbankan*, 1(2), 185-201. <https://doi.org/10.21098/bemp.v1i2.170>

Ngadino, Agus. 2009. Orang Bangsa Indonesia Asli Dalam Perspektif Hukum Kewarganegaraan. *Simbur Cahaya No. 38 Tahun XIII Januari 2009*.

Prasisko, Yongky Gigih. 2016. Gerakan Sosial Baru Indonesia: Reformasi 1998 dan Proses Demokratisasi Indonesia. *Jurnal Pemikiran Sosiologi Vol. 3 No. 2*. <https://jurnal.ugm.ac.id/jps/article/view/23532>.

Suryadinata, Leo. 2003. Kebijakan Negara Indonesia terhadap Etnik Tionghoa: Dari Asimilasi ke Multikulturisme?. *Antropologi Indonesia 71*.

Sumber internet:

<https://id.m.wikipedia.org/wiki/Tionghoa-Indonesia> diakses pada tanggal 14 Agustus 2019 pukul 12.00 WIB

<https://id.m.wikipedia.org/wiki/Klenteng> diakses pada tanggal 14 Agustus 2019 pukul 12.15 WIB

Kompasiana. 2016. Kelompok Siapa yang Paling Besar Garong Uang Negara. (Kompasiana, 17 Oktober 2016). Diakses pada tanggal 18 Mei 2019. <http://www.kompasiana.com/abahpitung/5804eb2cb07a618b2b09da51/kelompok-siapa-yang-paling-besar-garong-uang-negara?page=all>